

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten Non IHK (Non Indeks Harga Konsumen), sehingga digunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi setiap minggunya oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan pemantauan harga bahan pangan pada Triwulan I (Januari-Maret) harga rata-rata komoditas pangan sebagai berikut:

NO. KOMODITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1 Beras Premium	15.000	16.200	16.393
2 Beras Medium	14.000	15.200	15.393
3 Kedelai Biji Kering (Impor)	14.000	14.000	14.000
4 Bawang Merah	34.679	30.914	33.750
5 Bawang Putih Bonggol	37.071	35.000	39.107
6 Cabai Merah Keriting	45.607	73.714	52.857
7 Cabai Rawit Merah	47.500	51.286	56.071
8 Daging Sapi Murni	150.000	150.000	150.000
9 Daging Ayam Ras	35.000	35.000	37.750
10 Telur Ayam Ras	27.958	27.400	28.000
11 Gula Konsumsi	17.000	17.067	17.500
12 Minyak Goreng Kemasan Sederhana	16.000	16.000	16.000
13 Tepung Terigu (Curah)	12.000	12.000	12.000
14 Minyak Goreng Curah	15.000	15.000	15.000
15 Ikan Kembung	48.607	47.143	45.000
16 Ikan Tongkol	26.429	25.257	30.893
17 Garam Halus Beryodium	16.000	16.000	16.000
18 Tepung Terigu Kemasan	13.000	13.000	13.000
19 Beras SPHP	10.800	10.800	10.800

IPH Kabupaten Pesisir Barat tertinggi pada Triwulan I tahun 2023 terjadi pada Minggu Kedua Maret, yaitu 4,522% dengan komoditas andil beras, daging ayam ras dan cabai rawit. Kenaikan harga beras di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan

Berdasarkan data perkembangan harga komoditas dari Januari hingga Maret, berikut adalah beberapa analisisnya:

1. Kenaikan Harga Konsisten

- Beras Premium (15.000 → 16.200 → 16.393) dan Beras Medium (14.000 → 15.200 → 15.393) mengalami kenaikan harga tiap bulan.
- Cabai Rawit Merah juga terus naik dari 47.500 di Januari ke 56.071 di Maret.
- Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras menunjukkan kenaikan kecil di bulan Maret setelah stabil di dua bulan pertama.

2. Fluktuasi Harga

Bawang Merah turun dari 34.679 di Januari ke 30.914 di Februari, lalu naik ke 33.750 di Maret.

- Cabai Merah Keriting melonjak drastis di Februari (45.607 → 73.714), lalu turun kembali ke 52.857 di Maret.
- Ikan Tongkol mengalami penurunan di Februari lalu naik cukup signifikan di Maret.

3. Harga Stabil

- Kedelai Biji Kering (Impor), Daging Sapi Murni, Minyak Goreng (kemasan dan curah), Garam Halus Beryodium, dan Tepung Terigu (curah dan kemasan) tidak mengalami perubahan harga selama tiga bulan.

4. Penurunan Harga

- Ikan Kembung mengalami tren penurunan dari 48.607 di Januari menjadi 45.000 di Maret.
- Bawang Putih Bonggol turun di Februari, tapi kembali naik lebih tinggi di Maret.

Secara umum, harga cabai dan bawang menunjukkan volatilitas tinggi, sementara komoditas seperti minyak goreng dan tepung relatif stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat:

1. Ketergantungan pada Pasokan dari Daerah Lain Beberapa komoditas pangan masih mengandalkan dari daerah lain, seperti cabai, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih dan lain-lain.

2. Gangguan distribusi, seperti cuaca buruk atau hambatan logistik, bisa menyebabkan harga melonjak. Apalagi Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah rawan bencana longsor dan gempa bumi.

3. Fluktuasi Harga Pangan (Inflasi Volatilitas Tinggi) Kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak Minggu Keempat Februari 2024 hingga Minggu Keempat Maret dan tingginya permintaan terhadap komoditas pangan menjelang bulan Ramadhan menjadi penyebab tingginya IPH di Kabupaten Pesisir Barat pada bulan Maret.

4. Infrastruktur dan Distribusi yang Kurang Memadai Keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi menyebabkan biaya distribusi tinggi. Hambatan logistik mengakibatkan keterlambatan pasokan dan lonjakan harga.

5. Perubahan Musiman dan Faktor Cuaca

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

1. Melaksanakan Operasi Pasar / Gerakan Pangan Murah sebanyak 2 kali di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Pesisir Tengah;

▪

2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap minggunya, kemudian dilanjutkan dengan Rapat TPID untuk membahas persoalan yang ada dan mengambil langkah kebijakan pengendalian inflasi;
3. TPID Kabupaten Pesisir Barat secara rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok dan penting di 6 Pasar Tradisional dan melaporkan setiap hari kepada Itjen Kemendagri;
4. Mempublikasi data harga bahan pokok setiap minggu di Website Resmi Kabupaten Pesisir Barat agar dapat diketahui masyarakat dan mencegah panichbuying (belanja berlebihan).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

1. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah bahari dengan masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan dan petani. Hasil pertanian yang ada, yaitu damar, kelapa dan padi. Tanaman pangan seperti cabai rawit, bawang merah, jagung dan sayursayuran tidak banyak diminati oleh petani karena kondisi geografis yang tidak mendukung. Begitu pula dengan komoditas lain, seperti ayam potong dan telur ayam ras masih mengandalkan dari daerah lain.
2. TPID Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan BULOG untuk lebih intens dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah berbagai komoditas pangan, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras dan minyak goreng, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

1. TPID Kabupaten Pesisir Barat dengan keterbatasan anggaran sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Bulog untuk dapat lebih intens dalam melaksanakan Pasar Murah / Gerakan Pangan Murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi inflasi;
2. Bantuan bibit tanaman dan bantuan cetak sawah dan irigasi sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi dalam daerah;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan Program pengembangan dan penelitian tanaman pangan yang selama ini tidak diminati oleh petani, sehingga mengurangi ketergantungan dengan daerah lain dengan adanya produksi lokal.